

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Konsep yang berkaitan dengan konsep kesejahteraan sosial terdapat dalam beberapa pengertian tentang kesejahteraan sosial. Konsep kesejahteraan sosial juga membicarakan beberapa konsep yang berkaitan dalam dua pengertian yaitu secara luas dan secara sempit. Kesejahteraan sosial diartikan sebagai disiplin ilmu untuk mengembalikan keberfungsian sosial individu maupun kelompok.

1.1.1 Definisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya sedangkan Kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:9), yang dikutip dari Friedlander (1980) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisasi dari pelayanan pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu- individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi diatas dapat diketahui bahwa kesejahteraan sosial adalah sebuah usaha untuk memenuhi standar kehidupan, mengembangkan diri melalui pelayanan sosial, sehingga masalah sosial itu dapat teratasi. Dalam hal ini tercakup pula pelayanan kesejahteraan sosial

bagi anak, agar mereka dapat berkembang dengan sehat. Kesejahteraan anak sangat penting karena mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan meningkatkan kehidupan keluarga. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak menurut Muhidin (1992:49) adalah program yang komprehensif untuk anak yang terdiri dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak baik fisik mental maupun sosialnya. Pelayanan kesejahteraan anak termasuk asuhan bagi anak dalam keluarganya sendiri, di dalam keluarga pengganti atau lembaga-lembaga.

Definisi diatas dapat diketahui bahwa kesejahteraan anak sangat berhubungan dengan peningkatan kemampuan keberfungsian sosial bagi anak yang mengalami masalah perilaku. Dalam hal tersebut maka dalam penanganan anak terlantar juga harus di dukung oleh adanya pelayanan sosial yang mendukung guna mengembalikan keberfungsian sosial anak.

1.1.2 Tujuan dan Fungsi Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengurangi stress dan guncangan, sehingga memulihkan fungsi setiap orang, kelompok, dan masyarakat dalam kehidupan. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial tercermin dalam semua rencana kesejahteraan sosial sampai batas tertentu. Adapun menurut (Fahrudin, 2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, dalam arti tercapainya standar kehidupan dalam memenuhi kebutuhan dasar pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan mengeksplorasi sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang makmur dan memuaskan.

Menurut kutipan diatas, tujuan kesejahteraan sosial dapat difokuskan pada

terwujudnya pola dasar kehidupan manusia yang meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan ekonomi. Serta penyesuaian diri dalam meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Menjelaskan tujuan dari kesejahteraan sosial ialah mengembalikan keberfungsian seseorang atau tercapainya kondisi yang sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan materi, spritual, dan sosial maupun kebutuhan dasar seperti sandang, perumahan, dan pangan serta dapat beradaptasi dengan lingkungan secara baik. Peningkatan kualitas hidup menjadikan tujuan dari kesejahteraan sosial untuk mencapai kondisi hidup yang sejahtera bagi individu, kelompok maupun masyarakat. Maka dari itu kesejahteraan sosial digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial serta mencapai peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat yang lebih baik lagi. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memperbaiki fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggara kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan.

Menurut pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial diselenggarakan dengan tujuan agar mampu meningkatkan kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam mencapai kemandirian masyarakat, sangat diperlukan keberfungsian sosial dari masyarakat itu sendiri yang dimana mereka juga

memiliki peran penting sesuai dengan perannya masing-masing, maka dari itu diperlukannya ketahanan sosial yang merupakan upaya untuk mencegah dan menangani masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

Selain memiliki tujuan, kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi yaitu untuk mewujudkan atau mengembalikan keberfungsian sosial manusia, agar tercapainya kondisi sejahtera dan relasi serta adaptasi dengan lingkungan secara baik di masyarakat. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan, yang diakibatkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi kesejahteraan sosial lainnya yaitu dapat meningkatkan pembangunan sosial, perlindungan sosial, membangun masyarakat, dan memberdayakan masyarakat sebagai upaya kesejahteraan sosial dalam skala pembangunan sosial. Adapun fungsi kesejahteraan sosial menurut (Friedlander dan Apte dalam Fahrudin, 2012:12) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (*Development*)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Menurut pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa fungsi-fungsi tersebut berusaha dicapai untuk mengurangi tekanan dan mencegah timbulnya masalah sosial baru. Secara kompleks, fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masing-masing fungsinya memiliki fokus tersendiri. Pada fungsi pencegahan yaitu berupa tindakan yang dilakukan dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya masalah sosial. Fungsi penyembuhan ditujukan untuk pemulihan bagi setiap individu pada masalah kondisi pribadi agar dapat berfungsi kembali. Upaya yang dilakukan tentu akan terfokus pada tingkat keberfungsian sosial seseorang. Pada fungsi pengembangan ditujukan untuk memberikan atau membantu pada proses pengembangan sumber daya sosial masyarakat. Sedangkan pada fungsi penunjang mencakup berbagai kegiatan yang ada untuk membantu mencapai sektor pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

2.1.3 Keberfungsian Sosial

Siporin dalam Fahrudin (2012:62) menyatakan bahwa : “Keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya-berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa seseorang dikatakan berfungsi sosialnya jika ia mampu memenuhi kebutuhan dan menjalankan kehidupan sesuai peran sosialnya di lingkungan sesuai tuntutan peranannya.

Peranan sosial individu atau kelompok memiliki peran yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya, maka setiap orang akan berusaha mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-caranya serta menjalankan tugas-tugas kehidupan agar terpenuhinya kehidupan yang sejahtera. Fahrudin (2012:63) menyatakan bahwa:

Keberfungsian sosial menunjukkan keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan, dan penyesuaian timbal balik antara orang, secara individual atau secara kolektif, dan lingkungan mereka. Keberfungsian sosial dinilai berdasarkan apakah keberfungsian sosial tersebut memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada orang dan komunitasnya, dan apakah keberfungsian sosial itu normal dan dibenarkan secara sosial.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa tercapainya dan terpenuhinya keberfungsian sosial seseorang akan mencapai titik keseimbangan hidup dengan terpenuhinya segala kebutuhan dan tuntutan hidup. Selain itu tidak hanya terpenuhinya kebutuhan, tetapi juga peranan sosialnya berjalan sesuai dengan tuntutan peran sosialnya di lingkungan masyarakat. Peranan di lingkungan sosial dengan kebutuhan saling terkait, karena relasi dengan individu, kelompok ataupun di masyarakat menjadi suatu kebutuhan dalam status sosial seseorang dalam hubungan timbal balik. Adanya relasi diantara orang yang saling mempengaruhi akan membantu memenuhi tuntutan dalam peranan sosial.

Keberfungsian sosial menurut Skidmore, Thackeray dan Farley dalam dari Suharto (2009:5) adalah: “Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial. Ia merupakan pembeda antara pekerjaan sosial dan profesi lainnya”. Keberfungsian sosial merupakan hal penting bagi pekerja sosial untuk mengukur individu, kelompok, dan masyarakat dalam kondisi sejahtera. Dan terdapat elemen penting untuk mencapai keberfungsian sosial seseorang yaitu Keluarga, organisasi sosial, dan masyarakat maka apabila mereka mampu menjalankan peranan-peranan sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma sosialnya. Tidak terlepas lembaga-lembaga sosial seperti LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Keberfungsian sosial menurut Barlet dalam Fahrudin (2014:62) sebagai berikut: “Keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (coping) tuntutan (demands)

lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan”. Artinya seseorang dikatakan berfungsi sosialnya apabila dapat mengatasi dan menjalankan tuntutan sesuai peran sosialnya di lingkungannya yang merupakan sebagai bagian tugas-tugas kehidupannya. Individu, kelompok, dan masyarakat harus mampu menjalankan peranan-peranan sesuai dengan status sosialnya untuk mendukung keberlangsungan sosial yang baik.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya dalam upaya meningkatkan tingkat keberfungsian sosial dan mencapai derajat sejahtera secara profesional. Pekerjaan sosial merupakan kegiatan dimana profesi ini memberikan pertolongan kepada individu, kelompok, dan masyarakat untuk mencapai atau mengembalikan keberfungsian sosialnya dengan baik dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Pekerjaan sosial menurut Zastrow dikutip Suharto (2011:32) adalah:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi tersebut menyatakan bahwa profesi pekerjaan sosial merupakan kegiatan atau upaya praktik menolong mengembalikan keberfungsian seseorang dengan ilmu dan secara profesional selain itu menciptakan keadaan masyarakat yang berelingkungan baik semua ini dilakukan oleh ahli pekerja sosial tidak bisa dilakukan tanpa adanya nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang digunakan pekerja sosial pada dasarnya.

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang tentunya merujuk kepada ilmu-ilmu yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi yang merujuk pada ahli di atas menunjukkan bahwa

pekerjaan sosial sebagai wujud pertolongan baik kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan secara profesional guna menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif serta mengembalikan keberfungsian sosial seseorang. Pekerja sosial menurut pakar profesi pekerjaan sosial Soetarso dalam Huraerah (2008:39) adalah:

Pekerja sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal-balik yang saling menguntungkan antara orang dan lingkungan sosialnya (perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat) untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai suatu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pekerja sosial merupakan profesi yang dilaksanakan pada pemberian bantuan disertai adanya hubungan antar manusia dan adanya timbal balik. Sehingga dapat mengembangkan kemampuan personal untuk memperbaiki kualitas kehidupan yang sejahtera. Pekerjaan sosial berusaha untuk mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok ataupun masyarakat. Setiap orang memiliki peranan sosial yang menjadi kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status perannya.

1.2.1 Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan utama dari pekerjaan sosial yang melakukan praktik pekerjaan sosial adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial. Ketika keberfungsian sosialnya berfungsi, maka mereka bisa melakukan sesuatu hal untuk mengupayakan kehidupan dengan memenuhi kebutuhan dan mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Menurut *The National Association Of Social Workers* (NASW) dalam Huda (2009:15) awalnya pekerja sosial mempunyai 4 tujuan utama, namun *The Council On Social Work Education* menambah 2 tujuan pekerjaan sosial sehingga menjadi 6, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, menaggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya.
2. Menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar berjalan secara efektif.
4. Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak.
5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi.
6. Mengembangkan dan melakukan uji keterampilan atau pengetahuan profesional.

Pekerjaan sosial sebagai ahli memiliki tujuan berusaha untuk mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok ataupun masyarakat. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan oleh bukan ahlinya karena pekerja sosial memiliki ilmu dan profesionalitas dalam mengupayakan mengembalikan keberfungsian sosial.

1.2.2 Fokus Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial berfokus pada pengembalian keberfungsiaan sosial individu, kelompok, maupun masyarakat secara professional, menurut NASW yang dikutip Fahrudin (2012:66) fokus pekerja sosial adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa profesi pekerjaan sosial berfokus meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok ataupun masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan kemampuan, mengatasi

masalah hingga menghubungkan kepada sistem sumber dan pelayanan-pelayanan sosial, dan memperbaiki kebijakan sosial yang ada.

1.2.3 Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam membantu mengembalikan keberfungsian sosial seseorang dengan tidak keluar dari fungsi dan fokus pekerja sosial Seorang, Adapun fungsi-fungsi dasar pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Iskandar (1993:30), yaitu:

- a. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat system kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Didalam fungsi ini dilakukan melalui upaya pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan dan pemeliharaan penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial dan aksi sosial.
- b. Menjamin standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan yang memadai bagi warga yang mencakup tugas-tugas pekerjaan sosial.
- c. Membantu orang agar dapat berfungsi secara optimal di dalam institusi sosial maupun statusnya.
- d. Menopang dan memperbaiki tata tertib sosial dan struktur kelembagaan sosial.

Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa fungsi dari pekerja sosial merupakan memberikan pelayanan bantuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara mengembalikan keberfungsian seseorang dan mengembalikan fungsi setiap elemen pendukung dalam lingkungan yang baik sehingga dapat beradaptasi.

1.2.4 Prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial tentunya memiliki prinsip dalam ketentuannya untuk menangani suatu masalah, Menurut Mans dalam Fahrudin (2014: 16-19), ada enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa "menghakimi" klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja

- sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan kesulitan yang mengganjal di dalam pembicaraan.
2. Komunikasi
Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui system klien, maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.
 3. Individualisasi
Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain, sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara memberi kliennya, guna mendapatkan hasil yang diinginkan.
 4. Partisipasi
Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.
 5. Kerahasiaan
Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).
 6. Kesadaran diri pekerja sosial
Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak "kaku" dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara, dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses.

Menurut pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa, pekerja sosial memiliki beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam memberikan pertolongan kepada kliennya dengan tujuan agar hubungan antara klien dengan pekerja sosial dapat berjalan dengan lebih baik, maka dari itu seorang pekerja sosial dapat membangun hubungan yang lebih berarti dengan klien dan pekerja sosial mampu menerima kondisi klien, pekerja sosial yang baik juga mampu menjaga

kerahasiaan klien dan tidak boleh menyebarkannya tanpa persetujuan klien yang sedang ditangani.

1.2.5 Peran Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial memiliki tugas dan kewajiban untuk membantu menanggulangi masalah individu, kelompok, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui pengembalian keberfungsian sosialnya hal ini menjadi kewajiban pekerja sosial, Menurut Sukoco (2011:22) menyatakan peranan pekerjaan sosial adalah:

- a. Sebagai pemercepat perubahan (*Enabler*)
Seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses system sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar masalah dapat teratasi sehingga kebutuhannya terpenuhi.
- b. Peran sebagai perantara (*Broker*)
Menghubungkan individu-individu, kelompok- kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat, lembaga pelayanan dalam hal ini meliputi: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan.
- c. Pendidik (*Educator*)
Dalam menjelaskan peran sebagai pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu, kelompok, dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.
- d. Tenaga ahli (*Expert*)
Berkaitan sebagai tenaga ahli (*expert*), pekerja sosial dapat memberikan masukan-masukan, saran, serta dukungan informasi didalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat).
- e. Perencana Sosial (*Social Planner*)
Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok dan masyarakat, menganalisa, dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses system sumber yang ada untuk mengatasi masalah-masalah pemenuhan kebutuhan individu, kelompok serta masyarakat.
- f. Fasilitator
Pekerja Sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasikan atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk

mempermudah proses perubahan individu, kelompok dan masyarakat. Menjadi kualitas untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Menurut pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa pekerja sosial dalam memberikan pertolongan kepada klien dapat menggunakan beberapa peranan sosial yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dari klien tersebut. Pekerja sosial dapat memerankan beberapa peranan secara langsung kepada klien, artinya pekerja sosial dapat menggunakan beberapa peranannya saat memberikan pertolongan kepada klien dan tidak terpatok hanya pada satu peranan saja.

1.2.6 Tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Dalam mengembalikan keberfungsian sosial individu, kelompok, dan masyarakat pekerja sosial dibantu oleh lembaga-lembaga sebagai penghubung untuk mengembalikan keberfungsian sosial atau menangani masalah dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun pelayanan sosial semua ini pekerja sosial memiliki beberapa tahapan atau intervensi untuk membantu klien yang bermasalah. Adapun menurut Iskandar (2013:65), intervensi pekerja sosial adalah sebagai berikut:

1. Tahap *Engagement, Intake*, dan Kontrak

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Pada akhirnya dapat dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien.

2. Tahap *Assesment*

Assesment merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah terdahulu yang pernah

dilakukan klien (hasil dan kegagalannya), kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien. Dalam tahap *assessment* ini pekerja sosial dapat menggunakan teknik-teknik wawancara, observasi, dan teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap tepat.

3. Tahap membuat perencanaan intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan sebelumnya oleh pekerja sosial.

4. Tahap melaksanakan program

Berdasarkan rencana intervensi diatas, maka selanjutnya pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap tahapan.

5. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilakukannya untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan-hambatan yang terjadi.

6. Tahap Terminasi (pengakhiran/pemutusan kegiatan pertolongan)

Tahap terminasi adalah tahap yang dilakukan bilamana tujuan pertolongan dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referal atau bilamana karena alasan- alasan rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena lebih baik dialihkan kepada lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.

Menurut penjelasan enam tahapan diatas, dapat dijelaskan bahwa tahapan tersebut merupakan suatu tahapan-tahapan yang harus dipahami oleh seluruh pekerja sosial. Tahapan-tahapan ini bisa diterapkan kepada individu, kelompok, dan masyarakat dalam upaya mengembalikan keberfungsian sosialnya.

1.3 Konsep Masalah Sosial

Masalah sosial bisa juga diartikan sebagai sebuah kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuai yang tidak diharapkan. Adapun menurut Janssen dalam (Suharto, 2009) yaitu:

Masalah sosial didefinisikan sebagai perbendaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Horton dan Leslie memberikan pengertian masalah sosial sebagai suatu kondisi yang dirasakan oleh banyak orang tidak menyenangkan serta menuntun pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif.

Menurut pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa sebenarnya masalah sosial terjadi sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak selamanya bisa mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga dapat dikatakan dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Kondisi masyarakat ideal yang dimaksudkan adalah kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh perilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi.

1.4 Konsep Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara professional untuk membantu memecahkan permasalahan sosial yang dialami individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang memiliki masalah dengan menggunakan pendekatan pekerja sosial dan program pelayanan sosial sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan mewujudkan kembalinya keberfungsian sosial setiap individu. Pelayanan sosial menjadi perantara untuk mencapai keberfungsian sosial seseorang sehingga tercapainya kondisi sejahtera dan memiliki lingkungan yang baik, Pelayanan-pelayanan sosial memiliki fokus pada bidang sosialnya dan menyesuaikan permasalahan yang ada pada lingkungannya. Pengertian pelayanan sosial menurut Sainsbury dikutip Fahrudin (2012:50) menyatakan bahwa:

Pelayanan-pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal services*) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu khususnya, kebutuhan-kebutuhan dan

masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atas tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pelayanan-pelayanan sosial dapat digunakan untuk semua orang yang memerlukannya, pelayanan sosial memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar dan membantu menyelesaikan atau mengatasi masalah masalah sosial yang dihadapi setiap orang, agar tercapainya keberfungsian sosial yang berfungsi dan memiliki kondisi yang sejahtera sehingga dapat beradaptasi dan diterima dimasyarakat dengan baik, maka terdapat definisi pelayanan sosial dalam arti sempit menurut Romanyshyn yang dikutip Fahrudin (2012:51) pelayanan sosial adalah:

Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian individu-individu dan keluarga-keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung, dan (2) proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pelayanan sosial tidak sendiri untuk membantu mengembalikan keberfungsian sosial seseorang atau kelompok namun dibantu oleh sumber pendukung yaitu masyarakat, pekerja sosial, nonpemerintah dan pemerintah sebagai pemilik atau penyelenggara kebijakan pelayanan sosial, dengan mengaktifkan peran sosialnya masing masing dengan baik dari individunya sendiri dan lingkungannya, sehingga individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dapat mencapai kondisi yang sejahtera dan makmur.

Berkaitan dengan definisi diatas maka masalah kesejahteraan sosial anak diharapkan dapat terpecahkan melalui pelayanan-pelayanan sosial melalui lembaga-lembaga sosial salah satunya yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan memberikan pengetahuan yang dapat dimengerti oleh penerima manfaat yaitu anak jalanan guna memenuhi kebutuhannya dan mengembalikan keberfungsian sosialnya. Pada dasarnya, pelayanan sosial diberikan kepada

masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau masyarakat yang mengalami permasalahan sosial atau masalah sosial.

1.4.1 Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan Sosial merupakan aktivitas yang bertujuan memberikan pertolongan, bimbingan, dan perlindungan kepada individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial dengan baik, berkaitan dengan hal tersebut tentunya Pelayanan Sosial ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan serta perlindungan khusus. Menurut Fahrudin (2014:54) menjelaskan mengenai fungsi-fungsi pelayanan sosial yaitu:

1. Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan.
2. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
3. Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi dan nasihat.

Dapat dijelaskan bahwa, fungsi pelayanan sosial tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mendapat bantuan serta pelayanan dengan lebih tepat dan terarah yang dimaksudkan untuk menunjang masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya serta mencapai kesejahteraan.

1.4.2 Bidang-Bidang Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan kegiatan untuk mewujudkan keberfungsian sosial dengan dibantu oleh pekerja sosial yang ahli dan professional, untuk mempermudah fokus dalam membantu klien pelayanan sosial dibagi beberapa bagian sesuai fokus bidang belayanan sosialnya, Menurut Suharto (2013:14) dalam suatu pelayanan sosial diberikan kepada masyarakat setidaknya terdapat 5 bidang pelayanan sosial antara lain :

1. Jaminan Sosial merupakan sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan.
2. Pelayanan perumahan jaminan yang disediakan oleh pemerintah ini adalah perumahan publik atau perumahan sosial. Selain menyediakan rusunawa.
3. Kesehatan pelayanan kesehatan publik juga sebagian besar diperuntukan bagi warga kurang mampu. Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial, karena sebagian pelayanannya menyangkut atau berbentuk asuransi kesehatan.
4. Pendidikan negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademik, dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengantar penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga-lembaga non-formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswasiswa yang berprestasi atau tidak mampu.

Maka dapat dijelaskan bahwa, pelayanan sosial ini merujuk pada berbagai bentuk perawatan sosial diluar pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Dalam garis besar pelayanan ini mencakup tiga jenis yaitu perawatan anak, perawatan masyarakat, dan perawatan peradilan dan kriminal.

1.5 Konsep Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Serta anak dikatakan terlantar bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Terlantar dalam artian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar untuk memperoleh pendidikan yang layak dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua terhadap anaknya, dan ketidakmampuan atau kesengajaan (Suyanto, 2013:227). Adapun definisi anak terlantar berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pada Bab I pasal 6 mengenai ketentuan umum disebutkan bahwa, “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Ciri-ciri anak terlantar bukan hanya kategori anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya saja, melainkan adanya beberapa pendapat yang menyatakan adanya ciri-ciri anak terlantar yang lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Departemen Sosial (1995:8) menjelaskan bahwa:

Ciri-ciri anak terlantar adalah anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar yang berusia 0-21 tahun, anak terlantar yang mengalami perpecahan sehingga anak tidak dapat tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial, anak terlantar yang keluarganya tidak mampu melaksanakan fungsi dan peranan sosialnya secara wajar.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah keadaan dimana anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Anak terlantar tidak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta melaksanakan fungsi peranan sosialnya secara wajar. Anak terlantar yang dimaksud adalah anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar, anak dari keluarga tidak mampu, anak putus sekolah yang berusia mulai dari 0 tahun sampai 21 tahun dan status belum menikah.

1.5.1 Faktor Penyebab Anak Terlantar

Faktor penyebab terjadinya penelantaran anak dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat berupa keadaan anak itu sendiri, keluarga, maupun keadaan lingkungannya. Adapun faktor penyebab anak terlantar menurut Enni Hardiati (2010:23) yaitu:

- a. Keluarga dalam keadaan miskin, sehingga berbagai kebutuhan baik fisik, mental, maupun untuk perkembangan anak tidak dapat terpenuhi.
- b. Keluarga yang tidak utuh lagi ataupun keluarga yang kurang harmonis. Karena orang tua meninggal dunia, perceraian, dan sering terjadinya pertengkaran dalam keluarga

menyebabkan anak tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, akibatnya anak tidak merasa aman serta tidak mampu bergaul dengan lingkungannya.

- c. Lingkungan sosial yang kurang mendukung terhadap tumbuh kembang anak seperti tinggal di daerah kumuh dan daerah yang kurang sehat. Kondisi tersebut akan mempengaruhi pula perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar.
- d. Kecacatan yang dimiliki oleh anak itu sendiri, sehingga dengan kondisi kecacatan tersebut anak tidak bisa berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara wajar.

Faktor-faktor dominan dapat menimbulkan masalah sosial pada anak terlantar.

Faktor-faktor dominan tersebut dapat menjadi penghambat perkembangan anak.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sofwan dan Sumar Sulistyono (1997:20) yaitu:

- a. Terhambatnya asuhan karena anak tak punya orang tua atau meninggal dunia salah satu atau keduanya, dan anak yang tidak mampu secara material.
- b. Terhambatnya kemampuan fisik dan mentalnya karena kecacatan anak yang di alaminya.
- c. Terhambat penyesuaian dirinya dengan lingkungan sosial. Anak-anak yang mengalami masalah sosial perilaku (penyimpangan; misalnya sering mengganggu masyarakat yang sedang istirahat malam) dan anak-anak yang melanggar hukum atas putusan hakim.
- d. Terhambat karena menghadapi ancaman bahaya atau tekanan dari kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti anak-anak yang hidup dalam lingkungan daerah kejahatan dan di daerah lingkungan pelacuran.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab anak terlantar ditelantarkan dapat disebabkan oleh keluarga yang kurang mampu secara material, keluarga yang tidak harmonis dan tidak utuh, berada di lingkungan sosial yang kurang mendukung bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, memiliki kecacatan yang dialami anak sehingga

dapat membuat kepercayaan diri anak menjadi turun dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya.

1.6 Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan dan hak anak. Berdasarkan Intruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang pembangunan program yang berkeadilan, ditetapkan sebuah Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai wadah yang melaksanakan program tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Menteri Sosial RI Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang diharapkan program tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Program Kesejahteraan Sosial Anak merupakan bagian dari sistem Kesejahteraan Sosial secara luas. Kesejahteraan sosial sendiri adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Secara konseptual Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) lebih komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan program pelayanan sosial anak pada tahun-tahun sebelumnya karena sudah berdasarkan pendekatan anak, orang tua dan keluarga (*family based care*), dan kepada masyarakat yaitu Lembaga kesejahteraan sosial yang khusus menangani anak (LKSA). PKSA dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial anak bersyarat yang meliputi bantuan sosial atau subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar (akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan air bersih, rekreasi, keterampilan dan lain-lain), penguatan dan tanggungjawab orangtua atau keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak, dan penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) juga mendorong perubahan paradigma dalam pengasuhan, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan masyarakat, serta mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar anak yang dapat merespon keberagaman kebutuhan melalui tabungan. Dalam konsep kesejahteraan sosial, harus terdapat aspek pencegahan (primer), penanganan resiko (sekunder), maupun penanganan korban (tersier). Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) juga mencakup aspek perlindungan anak. Disini, titik berat ada pada penanganan masalah yang dialami anak. Konsep ini masuk dalam pelayanan tersier. Dalam PKSA, terdapat 5 cluster pelayanan anak, salah satunya adalah cluster anak jalanan atau dan anak terlantar. Berikut adalah sistem tujuan dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA):

1. Meningkatnya persentase anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk mendapatkan akses pada layanan sosial dasar.
2. Meningkatnya persentasi orangtua/keluarga yang akan bertanggungjawab atas pengasuhan dan perlindungan anak.
3. Menurunnya persentase anak yang memiliki masalah-masalah sosial.
4. Meningkatkan jumlah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan perlindungan untuk anak.

5. Meningkatkan jumlah pekerja sosial terlatih professional.
6. Mensinergiskan PKSA dengan program kesejahteraan pemerintah daerah.
7. Meningkatkan kerangka hukum bagi PKSA.